PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

UNIT KERJA : **WAKIL PIMPINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAIFUL ARIF**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **112678**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.725.560.000

1. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 15.750.000
2. Tanah Seluas 511 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA SELAYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 1472 m2 di KAB / KOTA SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 333.060.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 498.750.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 233.500.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX PICK UP/BAK TERBUKA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2010, LAINNYA Rp. 150.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**62.800.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**48.374.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.070.234.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.070.234.000**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.